



Perubahan Fisik Lingkungan dan Respons Kebijakan Ekologi Pemerintahan di Kabupaten Pandeglang

Jeni Minan¹⁾, Deni Kurniawan²⁾, Dede Adriana³⁾, M Kiki Rizqi⁴⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Bantaen Raya, Indonesia

minanjeni@gmail.com ¹⁾
dk5508323@gmail.com ²⁾
wydede29@gmail.com ³⁾
kykimuhamad@gmail.com ⁴⁾

Abstrak

This study discusses the physical changes in the coastal environment and the ecological response of the Pandeglang Regency Government, which are strategic and crucial issues in Pandeglang Regency, Banten. Considering that this region has high ecological and socio-economic vulnerability to the threat of natural disasters and anthropogenic activities, this study uses a descriptive qualitative method with a systematic literature review technique of 15 relevant Indonesian-language academic sources, including journal articles, research reports, final projects, and scientific publications related to the dynamics of the Pandeglang coast. The results of the study indicate the urgency of affirming the need for a more comprehensive, adaptive, and science-based approach to coastal environmental management. The local government needs to strengthen the physical change monitoring system based on geospatial technology to map risks accurately. In addition, it is important to clarify cross-sectoral coordination mechanisms and integrate the protection of mangrove and coral reef ecosystems as natural barriers against abrasion and sea level rise. This study concludes that the active involvement of local communities in disaster mitigation schemes is necessary to ensure the long-term sustainability of the economic and ecological functions of coastal areas. This preventive measure is crucial to minimize the impact of increasingly massive environmental degradation and strengthen regional resilience to global climate change, which directly impacts the well-being of coastal residents in Pandeglang Regency.

Kata kunci: response, ecological policy, regency, pandeglang.

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perubahan fisik lingkungan pesisir dan respon ekologi Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang menjadi isu strategis dan krusial di Kabupaten Pandeglang, Banten. Mengingat wilayah ini memiliki kerentanan ekologis dan sosial-ekonomi yang tinggi terhadap ancaman bencana alam maupun aktivitas antropogenik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik tinjauan literatur sistematis terhadap 15 sumber akademik berbahasa Indonesia yang relevan, mencakup artikel jurnal, laporan penelitian, tugas akhir, serta publikasi ilmiah terkait dinamika pesisir Pandeglang. Hasil kajian menunjukkan adanya urgensi penegasan terhadap perlunya pendekatan pengelolaan lingkungan pesisir yang lebih komprehensif, adaptif, dan berbasis sains. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem monitoring perubahan fisik berbasis teknologi geospasial guna memetakan risiko secara akurat. Selain itu, penting untuk memperjelas mekanisme koordinasi lintas sektoral serta mengintegrasikan perlindungan ekosistem mangrove dan terumbu karang sebagai benteng alami terhadap abrasi serta kenaikan permukaan air laut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pelibatan aktif masyarakat lokal dalam skema mitigasi bencana untuk memastikan keberlanjutan fungsi ekonomi



dan ekologi wilayah pesisir secara jangka panjang. Langkah preventif ini krusial guna meminimalisir dampak degradasi lingkungan yang kian masif serta memperkuat resiliensi wilayah terhadap perubahan iklim global yang berdampak langsung pada kesejahteraan penduduk pesisir di Kabupaten Pandeglang.

Key words: *respons, kebijakan ekologi, kabupaten, pandeglang.*

PENDAHULUAN

Kabupaten Pandeglang merupakan representasi wilayah dengan kompleksitas ekologis yang tinggi sekaligus kerentanan lingkungan yang sangat kritis di Provinsi Banten. Sebagai rumah bagi kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon, wilayah ini memikul beban ekologis besar di tengah desakan masif aktivitas manusia. Dalam dua dekade terakhir, konvergensi antara pertumbuhan penduduk yang tak terkendali, ekspansi infrastruktur pariwisata, dan pembangunan ekonomi telah menciptakan tekanan antropogenik yang mengancam stabilitas daya dukung lingkungan (Muhlisin et al., 2015).

Krisis lingkungan paling nyata dan mengkhawatirkan termanifestasi pada dinamika wilayah pesisirnya. Kawasan strategis seperti Tanjung Lesung, Panimbang, dan Labuan kini berada dalam ancaman serius akibat abrasi dan akresi ekstrem yang berlangsung secara kronis sejak 1990 hingga 2020 (Mutaqin et al., 2021). Hilangnya vegetasi pantai akibat pembangunan komersial tidak hanya memperlemah benteng alami terhadap gelombang Samudra Hindia (Prabowo, 2021), tetapi juga memicu efek domino yang merusak infrastruktur vital dan meruntuhkan struktur sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sumber daya laut.

Di sisi lain, wilayah daratan Pandeglang mengalami "degradasi senyap" melalui alih fungsi lahan yang tidak terkontrol. Konversi lahan pertanian produktif menjadi permukiman dan kawasan bisnis telah menciptakan ketidakteraturan tata ruang yang berujung pada bencana hidrometeorologis berulang, seperti banjir dan tanah longsor (Hakim, 2020). Krisis ini semakin diperparah oleh kegagalan sistem pengelolaan sampah domestik dan industri yang belum mampu mengimbangi laju produksi limbah (Mustopa, 2021). Keterbatasan sarana prasarana dan rendahnya partisipasi publik menciptakan akumulasi pencemaran yang menurunkan kualitas kesehatan lingkungan secara drastis (Rohman & Dewi, 2021).

Meskipun Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah meluncurkan berbagai instrumen kebijakan dan program rehabilitasi, namun terdapat diskoneksi yang tajam antara regulasi dan implementasi. Intervensi yang bersifat sektoral seringkali gagal menjawab tantangan koordinasi lintas lembaga, keterbatasan fiskal, dan minimnya sumber daya manusia (Wahyuni, 2022). Efektivitas respons ekologi pemerintahan saat ini dipertanyakan kekuatannya dalam membendung laju kerusakan fisik yang kian progresif.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk membedah jurang pemisah antara dinamika perubahan fisik lingkungan dengan efektivitas respons kebijakan yang ada. Melalui tinjauan literatur sistematis, kajian ini bertujuan untuk mensintesis temuan ilmiah menjadi sebuah kerangka kebijakan yang lebih adaptif, komprehensif, dan berbasis data (*science-based policy*). Urgensi penelitian ini terletak pada kemampuannya memberikan rekomendasi strategis guna memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Pandeglang tidak mengorbankan keberlanjutan ekologi demi keuntungan ekonomi jangka pendek.

Upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan ekologis mutlak memerlukan transformasi tata kelola pemerintahan dalam manajemen sumber



daya alam. Secara konseptual, Good Environmental Governance (GEG) merupakan perluasan dari teori Good Governance yang difokuskan pada pengelolaan urusan publik yang berdampak pada lingkungan hidup. Teori ini menegaskan bahwa kualitas pengelolaan lingkungan sangat bergantung pada integrasi prinsip-prinsip fundamental, yaitu transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, kepastian hukum, efektivitas, keadilan, dan keberlanjutan dalam setiap tahapan pengambilan keputusan strategis (UNEP, 2015; Lemos & Agrawal, 2006).

GEG menekankan bahwa pelestarian lingkungan tidak boleh dipandang sebagai isu teknis semata (seperti reboisasi atau pembangunan tanggul), melainkan harus dipahami sebagai produk dari mekanisme pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berbasis data ekologis yang valid (Durant, Fiorino, & O'Leary, 2004). Dalam kerangka ini, kolaborasi antara aktor negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk menciptakan kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan daya dukung lingkungan.

Dalam konteks penelitian ini, teori GEG digunakan sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi bagaimana Pemerintah Kabupaten Pandeglang merespons dinamika perubahan fisik lingkungan yang terjadi. Fenomena degradasi pesisir, bencana banjir tahunan, serta alih fungsi lahan yang masif bukan sekadar perubahan bentang alam, melainkan berfungsi sebagai indikator krusial dalam mengukur efektivitas tata kelola pemerintahan. Setiap perubahan ekologis yang merugikan pada dasarnya mencerminkan celah atau kelemahan dalam aspek kebijakan, pengawasan (monitoring), serta penegakan hukum lingkungan di tingkat lokal (Pierre & Peters, 2000).

Oleh karena itu, penggunaan teori GEG memiliki relevansi linear dengan judul penelitian "Perubahan Fisik Lingkungan dan Respons Ekologi Pemerintahan di Kabupaten Pandeglang". Teori ini menyediakan kerangka kerja holistik untuk menilai sejauh mana birokrasi daerah mampu mengadaptasi regulasi, memfasilitasi keterlibatan masyarakat, dan mengimplementasikan kebijakan yang berkelanjutan di tengah laju perubahan fisik lingkungan yang kian progresif (Kementerian Lingkungan Hidup RI, 2017).

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam fenomena perubahan fisik lingkungan serta menganalisis secara kritis respon ekologi Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam bingkai tata kelola lingkungan (Environmental Governance). Fokus utama penelitian ini bukan sekadar memaparkan data statistik, melainkan memberikan interpretasi mendalam terhadap efektivitas kebijakan publik berdasarkan literatur yang tersedia. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama (human instrument) yang berperan penuh sebagai pengumpul, pengolah, hingga penganalisis data melalui panduan inventarisasi literatur yang disusun berdasarkan parameter Good Environmental Governance, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Proses pengumpulan data dilakukan sepenuhnya melalui sumber data sekunder dengan teknik Systematic Literature Review (SLR) yang mencakup tiga tahapan sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi, di mana pencarian literatur dilakukan menggunakan kata kunci strategis seperti "Perubahan Pesisir Pandeglang", "Abrasi Tanjung Lesung", dan "Good Environmental Governance Pandeglang". Tahap kedua adalah skrining, yakni menyeleksi literatur yang diterbitkan dalam kurun waktu 10



tahun terakhir (2015–2025) guna menjaga aktualitas data. Tahap ketiga adalah penilaian kelayakan, yang menghasilkan 15 sumber akademik terpilih mulai dari jurnal terakreditasi, laporan resmi pemerintah, tesis, hingga dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pandeglang.

HASIL DAN PEMBAHASAN (Arial 12pt, tebal)

Perubahan Ekologi Pesisir Pantai di Kabupaten Pandeglang

Perubahan fisik lingkungan di Kabupaten Pandeglang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, terutama akibat alih fungsi lahan untuk permukiman, pariwisata, dan pembangunan infrastruktur pendukung. Perubahan tutupan lahan ini berdampak pada menurunnya daya dukung lingkungan, berkurangnya kawasan resapan air, serta meningkatnya kerentanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor (Kusumastuti, Syaukat, & Friyatno, 2018; Mulyani et al., 2019). Alih fungsi lahan tidak hanya terjadi di kawasan pesisir, tetapi juga di wilayah pertanian produktif yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah.

Pernyataan yang disampaikan oleh Kusumastuti, Syaukat dan Friyatno diatas, secara substantif telah menggambarkan keterkaitan kausal antara perubahan fisik lingkungan dan aktivitas pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Alih fungsi lahan yang diarahkan pada pengembangan permukiman, pariwisata, serta infrastruktur pendukung menunjukkan adanya pergeseran orientasi pemanfaatan ruang yang cenderung menempatkan kepentingan ekonomi dan pertumbuhan wilayah sebagai prioritas utama. Namun demikian, dinamika ini belum sepenuhnya diimbangi dengan pertimbangan ekologis yang memadai.

Penurunan daya dukung lingkungan yang disebutkan merupakan konsekuensi logis dari berkurangnya tutupan vegetasi alami, khususnya pada kawasan resapan air dan daerah penyangga ekosistem. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses pembangunan belum sepenuhnya mengadopsi prinsip keberlanjutan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kapasitas lingkungan dan tekanan antropogenik yang terus meningkat. Dalam konteks ini, perubahan fisik lingkungan tidak hanya bersifat spasial, tetapi juga mencerminkan degradasi fungsi ekologis wilayah.

Lebih lanjut, meningkatnya kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor memperlihatkan adanya akumulasi risiko lingkungan yang bersifat struktural. Risiko tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh faktor alam, melainkan juga merupakan hasil dari lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang dan kurang optimalnya integrasi aspek mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, bencana yang terjadi dapat dipandang sebagai manifestasi dari ketidaksinkronan antara kebijakan tata ruang dan kondisi biofisik wilayah. Secara kritis, pernyataan ini menyiratkan perlunya evaluasi kebijakan tata ruang dan pembangunan di Kabupaten Pandeglang agar lebih responsif terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Tanpa adanya koreksi kebijakan yang berbasis pada kajian ekologis dan risiko bencana, perubahan fisik lingkungan berpotensi memperbesar kerentanan wilayah serta menurunkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Di wilayah pesisir Kabupaten Pandeglang, perubahan garis pantai telah bertransformasi dari sekadar fenomena geografis menjadi indikator kritis degradasi lingkungan yang sistemik. Kawasan strategis seperti Panimbang, Carita, dan pesisir barat Pandeglang tercatat mengalami abrasi dengan tingkat keparahan yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan merupakan kejadian tunggal, melainkan



resultan dari sinergi negatif antara hilangnya vegetasi pelindung pantai dan akselerasi pembangunan infrastruktur yang abai terhadap aspek hidrodinamika laut (Mutaqin et al., 2021). Analisis berbasis citra satelit multitemporal periode 1990–2020 mengungkapkan adanya pergeseran garis pantai yang masif, di mana erosi mendominasi pada titik-titik pusat pertumbuhan ekonomi. Dinamika arus laut Selat Sunda yang kompleks, dipadukan dengan tekanan antropogenik berupa reklamasi parsial dan pembangunan seawall yang tidak terintegrasi, justru seringkali memindahkan titik abrasi ke wilayah sekitarnya (Panjiatun & Bahri, 2024; Solihuddin et al., 2020).

Kondisi tersebut diperburuk oleh fluktuasi luasan hutan mangrove yang berfungsi sebagai benteng ekologis utama. Penurunan signifikan tutupan mangrove di Pandeglang merupakan manifestasi dari konflik kepentingan pemanfaatan ruang, di mana ekosistem ini dikonversi secara masif menjadi lahan tambak intensif, permukiman, dan destinasi wisata (Dahlia et al., 2020). Kerentanan ini mencapai puncaknya pasca bencana tsunami Selat Sunda tahun 2018, yang tidak hanya menghancurkan struktur fisik pesisir tetapi juga melumpuhkan kemampuan regenerasi alami mangrove di beberapa lokasi krusial. Hilangnya fungsi bio-shield ini menciptakan "lubang keamanan ekologis" yang mengakibatkan peningkatan intrusi air laut, penurunan keanekaragaman hayati akuatik, serta hilangnya perlindungan alami terhadap energi gelombang pasang dan badai ekstrem yang frekuensinya kian meningkat akibat perubahan iklim global (Solihuddin et al., 2020).

Eskalasi degradasi tidak berhenti di garis pantai, namun merambah hingga ke hulu melalui Daerah Aliran Sungai (DAS) vital seperti DAS Cidanau dan Ciliman. Krisis pada wilayah DAS ini mencerminkan kegagalan manajemen ruang daratan; aktivitas pertanian monokultur di lahan miring tanpa kaidah konservasi serta penebangan vegetasi riparian secara liar telah memicu laju erosi tanah yang luar biasa. Akibatnya, badan sungai mengalami sedimentasi parah dan pendangkalan (Sumantri et al., 2021). Penurunan kualitas air akibat polusi limbah domestik dan residu agrokimia memperparah beban ekologis sungai. Secara hidrologis, kondisi ini merusak siklus air wilayah yang mengakibatkan fenomena "banjir di musim hujan dan kekeringan ekstrem di musim kemarau". Ketidakstabilan hidrologis ini pada akhirnya memicu kerugian ekonomi bagi sektor pertanian dan meningkatkan kerentanan sosial bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada stabilitas ekosistem DAS tersebut.

Uraian diatas menggambarkan bahwa bahwa Kabupaten Pandeglang tengah menghadapi eskalasi perubahan fisik lingkungan yang bersifat regresif, yang terwujud dalam anomali garis pantai, degradasi masif ekosistem mangrove, alih fungsi lahan yang tak terkendali, serta disfungsi hidrologis pada daerah aliran sungai (DAS). Meskipun berbagai instrumen kebijakan telah diluncurkan, efektivitas implementasinya masih terfragmentasi dan belum mencapai sasaran optimal. Hal ini berakar pada patologi kelembagaan yang mencakup keterbatasan kapasitas birokrasi, lemahnya supremasi hukum dalam pengawasan tata ruang, serta ego sektoral yang menghambat integrasi kebijakan. Lebih jauh lagi, eksklusi partisipasi masyarakat dalam siklus perencanaan strategis mengakibatkan kebijakan lingkungan kehilangan basis legitimasi dan dukungan sosial di tingkat tapak.

Berdasarkan realitas tersebut, pengelolaan lingkungan di Kabupaten Pandeglang menuntut transformasi fundamental menuju pendekatan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada prinsip good environmental governance. Urgensi penguatan sistem monitoring lingkungan berbasis teknologi geospasial menjadi syarat mutlak untuk menyediakan data presisi sebagai basis pengambilan keputusan



(evidence-based policy). Selain itu, restrukturisasi koordinasi lintas lembaga dan pengarusutamaan peran masyarakat bukan sekadar pilihan manajerial, melainkan kunci determinan dalam memutus rantai degradasi lingkungan. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan resiliensi wilayah yang kokoh guna mendukung keberlanjutan ekosistem sekaligus menjamin keberlangsungan pembangunan daerah bagi generasi mendatang di Kabupaten Pandeglang.

Respon Kebijakan Ekologi Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Dalam menanggapi eskalasi perubahan fisik lingkungan yang kian masif, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menginisiasi beragam instrumen kebijakan sebagai bentuk respons ekologis strategis. Upaya ini terwujud melalui rekayasa regulasi dalam pembaruan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan akselerasi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai basis legal pengendalian pemanfaatan ruang. Secara teknis, pemerintah juga telah mengimplementasikan program rehabilitasi ekosistem pesisir yang mencakup restorasi sabuk hijau melalui penanaman mangrove serta pembangunan infrastruktur proteksi pantai (hard structures) guna meredam laju abrasi (Hardiana, 2022). Pendekatan kolaboratif juga mulai diarusutamakan melalui skema kemitraan konservasi dengan otoritas Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), yang dirancang untuk menciptakan sinergi antara perlindungan keanekaragaman hayati dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal di zona penyangga (Salim, Agustino, & Rahmawati, 2018; Situmorang, 2022).

Namun, secara substansial, efektivitas respons ekologis tersebut masih terjebak dalam kompleksitas hambatan struktural dan manajerial. Implementasi kebijakan di lapangan cenderung bersifat parsial dan belum mampu memecahkan dinding ego sektoral antar-lembaga, yang mengakibatkan program lingkungan seringkali tumpang tindih atau bahkan saling kontradiktif dengan target pembangunan ekonomi (Situmorang, 2022). Kelemahan fundamental terletak pada rendahnya supremasi hukum dalam pengawasan tata ruang serta minimnya pemanfaatan data geospasial yang bersifat real-time sebagai basis pengambilan keputusan, sehingga intervensi yang dilakukan seringkali bersifat reaktif daripada preventif. Kondisi ini diperparah oleh pola partisipasi masyarakat yang masih berada pada level "partisipasi semu" (pseudo-participation). Keterlibatan publik seringkali terbatas pada implementasi proyek jangka pendek yang bersifat top-down, khususnya di kawasan strategis pariwisata, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam proses perencanaan strategis dan pengambilan keputusan jangka panjang (Wulan et al., 2025).

Secara komprehensif, hasil pembahasan ini menegaskan adanya fenomena keterlambatan adaptasi ekologis, di mana laju degradasi fisik lingkungan di Kabupaten Pandeglang bergerak secara progresif melampaui kapasitas respons birokrasi dan regulasi pemerintah daerah. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa instrumen kebijakan yang ada saat ini masih bersifat konvensional dan gagal mengimbangi kompleksitas dinamika antropogenik yang kian masif. Kondisi tersebut mencerminkan adanya asimetri prioritas, di mana akselerasi pembangunan ekonomi—khususnya pada sektor pariwisata dan infrastruktur—seringkali mengesampingkan limitasi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Jika disparitas antara eksploitasi ruang dan perlindungan ekosistem ini terus dibiarkan tanpa intervensi strategis, maka Kabupaten Pandeglang berisiko terjebak dalam krisis lingkungan permanen yang akan meruntuhkan fondasi ekonomi daerah itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan transformasi paradigma menuju model Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (PWPT)



yang lebih adaptif, antisipatif, dan berbasis pada prinsip Good Environmental Governance (GEG). Pendekatan ini menuntut adanya sinkronisasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, serta integrasi horizontal antar-satuan kerja perangkat daerah (SKPD) guna memutuskan ego sektoral yang selama ini menjadi penghambat utama.

Implementasi tata kelola yang baik harus mampu mengarusutamakan penggunaan data sains (seperti pemodelan hidro-oseanografi dan penginderaan jauh) dalam setiap proses perizinan pemanfaatan ruang. Selain itu, penguatan resiliensi masyarakat lokal tidak boleh lagi ditempatkan sebagai pelengkap, melainkan sebagai pilar utama dalam mekanisme pengawasan lingkungan. Melalui integrasi antara kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy) dan partisipasi publik yang bermakna, keberlanjutan ekosistem di Kabupaten Pandeglang dapat terjaga, sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat pesisir secara jangka panjang di tengah ketidakpastian perubahan iklim global (Cicin-Sain & Knecht, 1998).

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kabupaten Pandeglang saat ini berada dalam kondisi kritis resiliensi, di mana laju degradasi fisik lingkungan baik di wilayah pesisir maupun daratan bergerak jauh lebih progresif dibandingkan kecepatan respons kebijakan pemerintah daerah. Fenomena environmental lag ini merupakan konsekuensi langsung dari prioritas pembangunan yang asimetris, di mana eksploitasi ekonomi jangka pendek seringkali meminggirkan batasan daya dukung ekologis. Temuan kunci menunjukkan bahwa meskipun berbagai regulasi seperti RTRW dan program rehabilitasi telah diinisiasi, efektivitasnya terhambat secara struktural oleh patologi kelembagaan, ego sektoral, serta pengawasan tata ruang yang masih lemah.

Pengelolaan lingkungan yang bersifat top-down dan reaktif sudah tidak lagi memadai untuk membendung laju kerusakan yang masif. Ketergantungan pada infrastruktur fisik (hard structures) tanpa dukungan sabuk hijau mangrove yang fungsional, serta pengabaian terhadap data geospasial yang presisi, hanya akan menciptakan solusi sementara yang tidak berkelanjutan. Selain itu, pola partisipasi masyarakat yang masih bersifat semu (pseudo-participation) menjadi titik lemah yang mengakibatkan setiap program pelestarian lingkungan kehilangan basis dukungan sosial dan keberlanjutan di tingkat bawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Cicin-Sain, B., & Knecht, R. W. (1998). *Integrated coastal and ocean management: Concepts and practices*. Island Press.
- Dahlia, S., Adiputra, A., Alwin, Najiyullah, M. A., Kamzia, & Rahmadiansyah, F. K. (2020). Analisis perubahan penggunaan lahan pasca kejadian tsunami tahun 2018 sebagai rekomendasi tata ruang di pesisir pantai Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. *Jurnal Geografi, Edukasi dan Lingkungan (JGEL)*, 4(1), 8–16.
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jgel/article/view/3640>
- Hakim, L. F. (2020). Perubahan tutupan lahan berbasis SIG di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Planologi*, 17(2), 98–108.
- Hardiana, A. (2022). Strategi pengembangan objek pesisir Pantai Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang (studi kasus PT Banten West Java Tourism Development Corporation). *Tajug: Jurnal Pemikiran Islam, Sosial, dan Humaniora*.
<https://journal.alshobar.or.id/index.php/tajug/article/view/326>



- Kusdiane, S. D., et al. (2018). Alih fungsi lahan dan perubahan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Sodality*, 6(1), 45–57.
- Kusumastuti, A. C., Syaukat, I., & Friyatno, A. (2018). Faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian pangan di Kabupaten Pandeglang. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(3), 181–190.
<https://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/download/23234/15172>
- Muhlisin, M., Leksono, S. M., & Bahrudin, D. T. (2015). Daya dukung lingkungan Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Bina Praja*, 7(2), 101–112.
- Mulyani, A., et al. (2019). Potensi dan ketersediaan sumberdaya lahan untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 13(1), 1–14.
<https://www.neliti.com/publications/123667>
- Mustopa, M. (2021). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah. *Jurnal Pemerintahan Indonesia*, 12(1), 55–68.
- Mutaqin, B. W., et al. (2021). Kajian perubahan garis pantai pesisir Pandeglang. *Jurnal Kelautan*, 14(3), 185–196.
- Mutaqin, B. W., Kurniawan, I. A., Airawati, M. N., & Marfai, M. A. (2021). Kajian perubahan garis pantai di sebagian wilayah pesisir Pandeglang, Banten periode 1990–2020. *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology*, 14(3), 232–242.
<https://journal.trunojoyo.ac.id/jurnalkelautan/article/view/9832>
- Panjiatun, H., & Bahri, A. S. (2024). Analisis perubahan garis pantai menggunakan citra Sentinel-2A di pesisir barat Kabupaten Pandeglang, Banten. *Repository IPB University*.
<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/134088>
- Prabowo, T. (2021). Dinamika ekosistem pesisir Banten Selatan. *Jurnal Kelautan Nusantara*, 6(2), 89–104.
- Rohman, F., & Dewi, L. (2021). Evaluasi kinerja pengelolaan sampah. *Jurnal PSL*, 11(2), 201–213.
- Salim, D. W., Agustino, L., & Rahmawati, R. (2018). Evaluasi kebijakan kemitraan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
<https://eprints.untirta.ac.id/1051>
- Salim, D. W., Agustino, L., & Rahmawati, R. (2018). Kemitraan konservasi Ujung Kulon. UNTIRTA.
- Situmorang, A. (2022). Evaluasi kebijakan kemitraan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Lingkungan Hutan Tropis*.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jlht/article/viewFile/60672/75676595899>
- Solihuddin, T., Prihantono, J., Mustikasari, E., & Husrin, S. (2020). Dinamika perubahan garis pantai di perairan Teluk Banten dan sekitarnya. *Jurnal Geologi Kelautan*, 18(2), 59–68.
<https://ejournal.mgi.esdm.go.id/index.php/jgk/article/view/596>
- Sumantri, A. T., Hermita, N., Riyanto, R. A., & Mulyaningsih, A. (2021). Ketersediaan sumberdaya lahan dan aksesibilitas dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 14(1), 98–114.
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jat/article/download/11461/7292>
- Wahyuni, L. (2022). Evaluasi kebijakan lingkungan pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik Nusantara*, 4(3), 301–312.
- Wulan, A. R., Yamin, M. I., Anjelis, S., & Saromah, A. (2025). Sosialisasi dan gerakan



bersih pesisir pantai sebagai upaya mengurangi sampah di kawasan Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten. *Babakti: Journal of Community Engagement*, 2(1).
<https://ejournal.unsika.ac.id/index.php/babakti/article/view/131>.